



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.**
Jabatan : **KEPALA DINSOS KBPP KABUPATEN PEMALANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. JUNAEDI, S.H., M.M.**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 13 Januari 2020

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

Dr. H. JUNAEDI, S.H., M.M.

Pihak Pertama,
KEPALA DINSOS KBPP
KABUPATEN PEMALANG

Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Cakupan peserta KB Aktif	Persen	81,59
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Angka	85,55
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Persen	1,149
3	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	21,82
4	Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang meningkat kapasitasnya	Persen	60
		Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	47,3
		Persentase anak terlantar yang terbina	Persen	68,83
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan pelaporan	Persen	100
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100
		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100
		Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100
		Persentase peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Persen	100
6	Meningkatnya PMKS yang memperoleh bantuan melalui pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	Persen	21,82
		Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar	Persen	21,82

		Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	57,43
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	30,6
7	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBPP	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Dinsos KBPP yang terpenuhi	Persen	100
		Nilai AKIP Dinsos KBPP	Nilai	60
8	Meningkatnya sarana prasarana panti sosial yang mendapat bantuan	Persentase Panti Sosial skala Kabupaten / Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100
9	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	Persen	43,07
		Rasio KDRT	Permil	0,005
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	Persen	100
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	Persen	100
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	Persen	100

		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100
		Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	70,71
10	Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya) yang telah terbina	Persen	52,52

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.109.044.000	DAU
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	519.785.500	DAU
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	146.450.000	DAU
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	82.491.000	DAU
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	148.275.000	DAU
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera	1.261.300.000	DAU
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.050.375.000	DAU
		1.122.057.000	DAK
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	110.000.000	DAU

9	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	143.545.000	DAU
10	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial I	30.000.000	DAU
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	158.950.000	DAU
12	Program pembinaan anak terlantar	155.955.000	DAU
13	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	281.150.000	DAU
14	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	657.787.500	DAU
15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	555.875.000	DAU
16	Program Keluarga Berencana	1.534.503.500	DAU
		1.488.156.000	DAK
		4.448.232.000	DAK
17	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	156.250.000	DAU
18	Program pelayanan kontrasepsi	181.184.000	DAU
19	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	887.750.000	DAU
20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	90.000.000	DAU
21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	121.012.500	DAU
22	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	300.000.000	DAU
JUMLAH TOTAL		Rp 16.740.128.000	

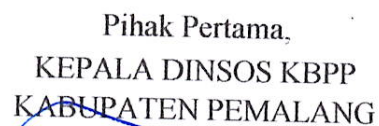
Pemalang, 13 Januari 2020

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG



Dr. H. JUNAEDI, S.H., M.M.

Pihak Pertama,
KEPALA DINSOS KBPP
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.